



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2026

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2025

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.84	72,52	0,95%
2	Angka Kemiskinan	6.32	5,81	-8,07
3	Angka Pengangguran	4.03	4.55	12,90
4	Pertumbuhan Ekonomi	13,92	34,17	145,47%
5	Pendapatan per Kapita	71,52	97,26	35,99%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,316	0,299	-5,38%

Sumber Data : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	89,26 %	84,50 %
2.	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.	62,05 %	50,75 %

3.	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	-	48,30%
4.	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	-	43,92%

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 sebesar Rp. 779,733,937,403.00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Gratis
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah (APBD 2025)
3. Program Makan Bergizi Gratis
4. Beasiswa Pendidikan Maluku Utara

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya khususnya pada sebaran dan kompetensi
2. serta belum meratanya sarana dan prasarana.
3. Ketidaktepatan waktu dalam input data
4. Lemahnya koordinasi antar bidang teknis
5. Keterbatasan dana
6. Proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron
7. Kurangnya koordinasi antar SKPD
8. Minimnya SDM Perencana

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,3427%	0,60 %
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (IKK Lama)	62,05 %	

	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna (IKK Baru)	–	80,00 %
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0%	42,88 %
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	0%	61,65%

Sumber Data: Dinas kesehatan Provinsi Maluku Utara

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 433,250,810,777.91 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG/PKG)
2. Program Soligi Zero Stunting: Kolaborasi intensif untuk menekan angka stunting (kekerdilan) di Maluku Utara.
3. Peningkatan Pengawasan Kesehatan Lingkungan: Fokus pada pengawasan kualitas air bersih, sanitasi, higiene makanan/minuman, dan pengelolaan limbah.
4. Penguatan Layanan Kesehatan Inovatif: : Pengembangan berbagai inovasi dari seksi promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antar instansi.
2. Belum ada SK Wilayah Rawan Bencana Kab/Kota.
3. Data mengenai tim krisis dan TGC (KLB) kab/Kota sulit di konfirmasi apakah masih tetap atau berubah.
4. Jumlah sasaran penduduk terdampak belum di ketahui karena tidak ada SK wilayah rawan bencana masing-masing kab/kota.
5. Perhitungan kebutuhan belum spesifik menggunakan data sasaran berdasarkan SK wilayah rawan bencana Kab/Kota.
6. Juknis tentang perhitungan kebutuhan dan penyimpanan kebutuhan barang belum spesifik.
7. Data tim Krisis dan TGC (KLB) Kabupaten/Kota belum dikonfirmasi maka perhitungan kebutuhan SDM masih menggunakan data yang telah mengikuti pelatihan tahun-tahun sebelumnya.
8. Anggaran terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan prakrisis tidak dapat dilakukan untuk semua wilayah di kab/kota.
9. Standar harga dari kebutuhan barang dapat berubah.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan Provinsi	65,54%	0%
2.	Tingkat kemantapan jalan	0	45,93%
3.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	0%	0%
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	23,54%	52,80%
5	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0%	0%
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1.420	93,22 %
7	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provins	-	0%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Urusan Provinsi Maluku Utara

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 341,642,298,881.00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Konektivitas (Jalan & Jembatan)
2. Infrastruktur Wilayah (RPIW): Mendorong pengembangan wilayah berbasis Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025-2034.
3. Optimalisasi Sumber Daya Air (SDA): Pelaksanaan proyek sarana air bersih dan pengairan untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat.
4. Infrastruktur Berbasis Inpres

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan memperoleh Data By Name By address yg terupdate. Data diperoleh adalah data sekunder yg diperoleh dari Kantor Desa/kelurahan dan BKKBN yg tidak selalu update tepat waktu.
2. Dalam Perhitungan Kebutuhan Air eksisting sangat berbeda jumlahnya dengan Perhitungan Kebutuhan Air berdasarkan Format SPM, karena sebagian besar penduduk yang berdomisili di Kota Sofifi merupakan pendatang/PNS Daerah/PNS Vertikal.
3. Minimnya alokasi anggaran kegiatan yg mendukung program SPM (air minum & air limbah).
4. SPAM dan SPAL Regional belum terbentuk secara keseluruhan, tetapi untuk koordinasi dengan Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan telah dilakukan, namun belum final. infrastruktur dasar berupa Intake, IPA, reservoir dan SR sudah ada dan pelayanan Air bersih kepada masyarakat yang sudah terbentuk untuk daerah Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	100%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	0%	100%
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0%	52,38%

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp 69,546,008,736.00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Renovasi/Pembangunan RTLH (Rutilahu): Penyediaan bahan dan upah untuk 700 unit rumah, yang sebagian besar menggunakan material *polyvinyl chloride* (PVC).
2. Penataan Kawasan Kumuh: Peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi yang layak.
3. Sinergi Data dan Pemutakhiran Data RTLH: FGD sinergi untuk memastikan efektivitas sasaran program.
4. Pembangunan Rumah Komunitas Pesisir: Terintegrasi dengan program pembangunan kawasan nelayan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. belum optimalnya koordinasi antara pemerintah tingkat provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan data bencana alam.

5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	66,67 %
2	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	50%	100 %
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	50%	100 %
4	Persentase penanganan pra bencana	0%	0%
5	Persentase penanganan tanggap darurat Bencana	100%	90%
6	Persentase penanganan pasca bencana	-	25%

Sumber Data: Satuan Polisi PP Provinsi Maluku Utara

Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp 40,248,526,499.00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota: Pelatihan intensif untuk meningkatkan kedisiplinan, pemahaman hukum, dan profesionalisme anggota Satpol PP dan Damkar guna mendukung peran sebagai aparat penegak Perda yang tangguh.
2. Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada: Penguatan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di wilayah Provinsi Maluku Utara.
3. Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Peningkatan operasi patroli dan monitoring secara berkala, termasuk monitoring Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat.
4. Optimalisasi Perlindungan Masyarakat: Kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Data Perda/Perkada yang memuat sangsi belum diketahui jelas.
2. Belum mengetahui kawasa atau wilayah yang berpotensi terjadinya dampak terhadap warga negara apabila dilaksanakan penegakan perda/perkada.
3. Perhitungan kebutuhan sulit dilakukan karena belum mengetahui kawasan atau wilayah yang berpotensi terdampak.
4. Dampak penegakan perda/perkada merupakan bagian dari kejadian yang tak terduga sehingga penghitungan kebutuhan dalam penganggaran dengan sistem paket.
5. Perencanaan terkait dengan penerapan SPM Trantibum telah termuat dalam dokumen perencanaan baik dalam RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA.
6. Penganggaran terkait dengan alokasi kebutuhan sarana dan prasarana masih sangat minim.
7. Selama pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada belum pernah terjadinya dampak terhadap warga negara baik korban fisik maupun korban kerugian Material sehingga anggaran yang tersedia setiap tahun tidak realisasi.
8. Ketersediaan Sarana dan Prasaran perlu ditingkatkan dalam Pelaksanaan operasional Penegakan perda dan perkada.
9. Peningkatan Kpasitas SDM Satpol PP terus menerus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi SPM Trantibum.
10. SOP yang belum tersedia diperlukan pembiayaan agar pelaksanaan operasional dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
11. Dalam pelaksanaan tugas operasional, Aparatur Satpol PP sering mengalami korban fisik namun tidak ada pembiayaan terkait hal ini karena belum ada sub kegiatan untuk pembiayaan.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	0%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	23,20%	11,59%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	1,70%	6,38%

4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	0%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	0,67%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 37,723,399,131.99 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Masih Program Rehabilitasi Sosial
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
2. Program Penanganan Bencana
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar dan gelandangan pengemis.
2. Minimnya personil yang menangani data di Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara
3. Sulitnya mengumpulkan data yang akurat dan lengkap, dalam situasi darurat.
4. Sulitnya akses ke lokasi bencana, khususnya di daerah terpencil dan sedikit terisolasi.
5. Kendala mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan format.
6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data.
7. sulitnya mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas
8. kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, organisasi dan masyarakat dalam penghitungan kebutuhan.
9. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam panti / UPTD Lingkup Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, hal ini berdampak dalam melakukan penghitungan kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan yang belum maksimal sesuai dengan perhitungan kebutuhan klien panti.

10. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana.
11. Sulitnya mengalokasikan anggaran yang tepat untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
12. Ketergantungan pada sumber daya eksternal
13. Adanya refocussing anggaran yang berimbas pada kurang maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam panti.
14. Kurangnya komitmen pemangku kebijakan dalam mengalokasikan anggaran Bidang Urusan Sosial sehingga anggaran yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Provinsi Maluku Utara belum memiliki Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dan Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti sehingga dua jenis SPM bidang sosial ini tidak dapat diintervensi karena belum ada sarana dan prasarana gedung panti.
16. Sulitnya melakukan koordinasi antara instansi pemerintah, organisasi dan masyarakat untuk melaksanakan SPM Bencana
17. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan SPM Bencana
18. Kurangnya evaluasi dan pemantauan yang memadai untuk menilai efektivitas pelaksanaan SPM Bencana

III. HASIL EPPD DAN PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

- 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Secara Nasional Tahun 2024, Provinsi Maluku Utara memperoleh skor kinerja sebesar 1,5041 dengan status 'Sangat Rendah' (berdasarkan laporan tahun 2023). Sementara itu, untuk tahun 2024, skor kinerja meningkat menjadi 2,2455 dengan status 'Rendah', sedangkan laporan untuk tahun 2025 saat ini masih dalam proses penyusunan.
- 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi badan pemeriksa keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2025 mencapai 38%. Dari total 120 rekomendasi, sebanyak 45 ditindaklanjuti, sedangkan 75 sisanya masih dalam proses.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 **Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025** mencapai sebesar **Rp. 3.629.568.652.293,15** dan **Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025** mencapai **Rp. 3.260.631.208.000,51**

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	3.505.592.645.696,00	3.629.568.652.293,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.148.501.801.376,00	1.088.066.760.689,95
4.1.01	Pajak Daerah	956.000.000.000,00	1.039.195.008.251,09
4.1.02	Retribusi Daerah	17.088.335.475,00	11.862.071.061,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.226.037.000,00	1.575.573.263,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	164.183.177.378,00	160.034.207.844,97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.148.501.801.376,00	1.088.066.760.689,95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.337.661.466.000,00	2.395.525.115.783,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.337.661.466.000,00	2.395.525.115.783,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0	0
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0	0
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.337.661.466.000,00	2.395.525.115.783,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	0	0
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.337.661.466.000,00	2.395.525.115.783,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.429.378.320,00	21.376.676.090,09
4.3.01	Pendapatan Hibah	212.282.000,00	212.282.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	212.282.000,00	212.282.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.429.378.320,00	21.376.676.090,09
	JUMLAH PENDAPATAN	3.505.592.645.696,00	3.629.568.652.293,15
5	BELANJA DAERAH	3.481.008.995.776,00	3.260.631.208.000,51
5.1	BELANJA OPERASI	2.537.535.528.669,29	2.410.134.630.143,18
5.1.01	Belanja Pegawai	1.172.900.254.812,01	1.148.878.390.383,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.201.839.779.054,28	1.119.879.611.970,18
5.1.03	Belanja Bunga	3.500.000.000,00	3.023.117.878,00
5.1.05	Belanja Hibah	151.585.522.803,00	133.080.893.912,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.582.500.000,00	2.282.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.537.535.528.669,29	2.410.134.630.143,18
5.2	BELANJA MODAL	611.133.210.126,71	522.040.185.877,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	55.578.396.593,00	27.350.847.519,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.001.847.727,71	187.974.342.707,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.373.210.536,00	121.045.947.083,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.786.042.592,00	169.403.595.057,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.771.311.858,00	14.721.924.650,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.622.400.820,00	1.543.528.861,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	611.133.210.126,71	522.040.185.877,33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.551.745.521,00	18.231.483.960,00

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.551.745.521,00	18.231.483.960,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.551.745.521,00	18.231.483.960,00
5.4	BELANJA TRANSFER	310.788.511.459,00	310.224.908.020,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	308.788.511.459,00	308.224.908.020,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	310.788.511.459,00	310.224.908.020,00
	JUMLAH BELANJA	3.481.008.995.776,00	3.260.631.208.000,51
	SURPLUS/DEFISIT	24.583.649.920,00	368.937.444.292,64
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-24.583.649.920,00	-20.336.801.677,17
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.635.432.000,00	37.866.811.979,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.635.432.000,00	37.866.811.979,83
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.635.432.000,00	37.866.811.979,83
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	89.486.305.540,00	89.486.305.540,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	89.486.305.540,00	89.486.305.540,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.219.081.920,00	58.203.613.657,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-24.583.649.920,00	-20.336.801.677,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	348.600.642.615,47

IV. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Provinsi Maluku Utara memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	MANISO BACA
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inovasi pelayanan publik	Digital	PENINSULA SIBUA LITERASI
3	Dinas Pangan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KEDAI PANGANMU
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	CERIA (Cegah Perkawinan Anak)

5	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	LARUTAN (Lapas Rutan) Tolak TBC
6	Dinas Perhubungan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	FOR LALA KU (Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Maluku Utara)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Si Cantik
8	UPTD RSUD Sofifi	Inovasi pelayanan publik	Digital	Stay 24
9	Dinas Kehutanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Pengolahan Nira menjadi Gula Semut (PERMEN GULA MU)
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Warung Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (WARKOP KEUDA)
11	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GEMARMU KETAWA (GERAKAN MASYARAKAT MALUKU UTARA PEDULI KESEHATAN JIWA)
12	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SI MALAHA (Aksi Maluku Utara Landaikan Angka HIV/AIDS)
13	UPTD RSJ Sofifi	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PEKA JIWA
14	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	SODARA
15	Badan Kesbangpol	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ORMAS BALAPOR
16	UPTD RSUD Sofifi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Arsitek Metal
17	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIPENA (SISTEM PENDAMPINGAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER MALUKU UTARA)
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	KABATA (Kelestarian Budaya Tradisional)
19	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	DOKIS IPKD
20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Cici_Novi Go Publik
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KOLOLI KIE (Konsultasi Keliling Melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi)

	Perlindungan Anak			
22	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GENZ TANGGUH (Generasi Sehat, Tanggap Gizi, dan Taat TTD)
23	UPTD RSJ Sofifi	Inovasi pelayanan publik	Digital	BERNADYA (BERSAMA REHABILITASI UNTUK NYALA DAYA JIWA)
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Digital	MEETING Dengan Kawan
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIMOREGAM
26	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	AMIRA
27	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SORGA
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	MIRANDA
29	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KARISMA (KADER POSYANDU RESPONSIF, AKTIF, SIGAP, TERAMPIL)
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	TAMARA
31	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SI ERNI
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	RAISAH
33	Satuan Polisi Pamong Praja	Inovasi pelayanan publik	Digital	SATRIA BIRU GASS FULL...!!!
34	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BERGIZIKU (BERSAMA AKSI BERGIZI SEHAT DAN BERKEMAJUAN UNTUK NEGERI)
35	Badan Pendapatan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIDOLA BATAGI
36	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SETARA (SEHATKAN EMOSI DAN TANGANI TRAUMA REMAJA)
37	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIASTRI

38	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	INSPIRASI 3T (INOVASI PELAYANAN KESEHATAN TERPADU WILAYAH TERLUAR, TERPENCIL,
----	-----------------	--------------------------	-------------	---

				DAN TERTINGGAL)
39	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIGAP (SINERGI GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT)
40	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SHAKIRRA
41	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	MONALISA
42	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	EVITA
43	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	PUTRI
44	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SAIRA
45	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASAS MALUT (AKSI SEHAT ANAK SEKOLAH MALUKU UTARA)
46	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GEPEDIA PETAS (GERAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT PRIORITAS)
47	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KLIK PENGADAANMU
48	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SALOI (Sistem Layanan Informasi) Riset dan Inovasi Daerah
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Inovasi pelayanan publik	Digital	Sofifi Central Park (English Version) 2023
50	Dinas Kehutanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	PERCEPATAN PENATAAN KAWASAN HUTAN MELALUI PROGRAM TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (PAKATORA)
51	Badan Pendapatan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Digital	GO-CAP (Go Cicil Aja Pajak)
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Koordinasi Forum Disabilitas dan Perangkat Daerah (KoFor Daerah)
53	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Inovasi pelayanan publik	Digital	SI MASTRANS (Sistem Informasi Masyarakat Transmigrasi)

54	Dinas Perhubungan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SI MANJUR (RENCANA AKSI ANGKUTAN KOTA DALAM SATU PROVINSI)
55	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GERAKAN PENINGKATAN LAYANAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTIFIKASI BENIH (LARIS BENIH)
56	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BUGAR
57	Satuan Polisi Pamong Praja	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	SIPANDA MERAH
58	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	PENGAIT DASAR PARAU
59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIDAK MALUT
60	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	GOROPA
61	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	CEGAH KUMUH
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Satu Hati Untuk Anak Istimewa (SAH ASI) "Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Khusus Berbasis Gotong Royong Sekolah dan Masyarakat"
63	Dinas Sosial	Inovasi pelayanan publik	Digital	PESANT MU
64	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SEGAR
65	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Digital	AKSELERASI KINERJA PENYULUH DENGAN LAYANAN QR CODE "SI-TANI"
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	TERA VAJARU (Strategi Penerapan Evaluasi Kinerja Guru SLB)
67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Inovasi pelayanan publik	Digital	FOLAMUNARA (FORUM LAYANAN MANAJEMEN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA)

68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SIGARO SALAMAT (SIGAP, ORANGNYA SELAMAT)
69	Biro Perekonomian	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIPIDA = SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
70	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	TARIKAN PUKAT DAPAT RAHMAT
71	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Penasaran Klick Aset
72	Inspektorat	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SI DUMAS
73	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIPARAU
74	Sekretariat DPRD	Inovasi pelayanan publik	Digital	AsmaraMU (Aspirasi Masyarakat Maluku Utara)
75	Sekretariat DPRD	Inovasi pelayanan publik	Digital	E_SURAT (Aplikasi Sistem Surat Online)
76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Komunitas Pemuda Siaga Darurat Bencana (KOPI DABE)
77	Sekretariat DPRD	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Sayang DPRD (Sistem Absensi Layanan Anggota DPRD)
78	Sekretariat DPRD	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	RincianKu
79	Biro Administrasi Pembangunan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara tahun 2024

80	Biro Organisasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Sistem Informasi analisa jabatan (Sinjab)
81	Inspektorat	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIPAKA (SISTEM PEMANTAUAN LAPORAN KEUANGAN)

82	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Inovasi pelayanan publik	Digital	LAMITI (layanan mandiri izin penelitian)
83	Badan Pendapatan Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Sistem e-Samsat untuk peningkatan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor
84	Dinas Sosial	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	"SI PELITA" Akselerasi Pelayanan Rehabilitasi
85	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Digital	SETETES MANI SEJUTA HARAPAN MENUJU SEJAHTERA "SAPI IMUT"
86	Biro Administrasi Pembangunan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	TIM REAKSI CEPAT LAYANAN IT(TRC)
87	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Layanan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Berbasis Swakelola dan Inovasi Sosial
88	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SiRanting
89	Biro Hukum	Inovasi pelayanan publik	Digital	Si BANKUM
90	Labkesmas Dinas Kesehatan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	SANTUN LAKSANA (SISTEM ADMINISTRASI TATA NASKAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT)
91	Biro Hukum	Inovasi pelayanan publik	Digital	Biro Hukum Inovasi
92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Lola Amaria Desa (Pengelolaan Profil Desa Melalui Babari Data Desa)
93	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Peningkatan pembangunan ekonomi di desa bere-bere
94	RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Sobat Kita
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	PEPET TERUS (Pendampingan dan Pengendalian Terintegrasi Urusan Sarpras)
96	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Digital	SISTEM PENGELOLAHAN INFORMASI DAN DATA HARGA PANGAN
97	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Solusi LTT Intensif dan Efisien Berbasis Kolaborasi Penyuluh dan Petani
98	Dinas Pemberdayaan	Inovasi tata kelola	Non Digital	Setuju Satu Data Untuk Profil

	Masyarakat Desa	pemerintahan daerah		Desa/Kelurahan (SESADU PRODESKEL)
99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Lembaga Kemasyarakatan Mitra Sejati Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LEMSIP)
100	Inspektorat	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SIAPTL (SISTEM APLIKASI PEMANTAUN TINDAK LANJUT)
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	(PEREKAT SIBUMDES) PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI BUMDES
102	Dinas Pertanian	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Pengembangan Lahan Baru Hortikultura Mendukung Kemandirian Pangan
103	Satuan Polisi Pamong Praja	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GATRAMAS
104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMA4)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ASGUTEK
105	Biro Umum	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	SMART-BBM (Sistem Monitoring dan Analisis Real Time - Bahan Bakar Minyak)
106	Biro Umum	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	STEREK-ASN (Sistem Terintegrasi Real-Time Evaluasi Kinerja - ASN)
107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMA6 Halut)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SABUSAKU

V. PENUTUP

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana dikemukakan dalam LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu saja masih membutuhkan proses yang panjang dan kesinambungan, serta pengelolaan yang efektif mengingat karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga hal-hal yang tergambar dalam LPPD ini hanyalah merupakan salah satu Indikator dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Namun demikian, dengan komitmen dan optimisme yang tinggi, serta dukungan dari semua *stakeholder* pemerintah diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Akhirnya, Semoga LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini bisa memberikan manfaat bagi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

